

**Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10
Tahun 2005 Tentang Penyakit Masyarakat Judi Dan
Minuman Keras di Tinjau Hukum Islam
(Study Kasus di Kecamatan Bunguran Barat)**

**SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam**



OLEH :

MUHAMMAD ZAKI

NIM: 10324022517

**PROGRAM S1
JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2010

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penyakit Masyarakat Judi Dan Minuman Keras di Tinjau Hukum Islam (Study Kasus di Kecamatan Bunguran Barat). Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor penghambat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Kabupaten Natuna khusus pasal 2 ayat 2 tentang penyakit masyarakat yaitu larangan judi dan minuman keras di Kecamatan Bunguran Barat serta untuk mengetahui pandangan menurut Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan unsur-unsur Kecamatan Bunguran Barat. Sedangkan diambil dengan cara *puspositive sampling*. Jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu : dengan mengklasifikasikan data kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut. Kemudian diuraikan antara satu dengan yang lain dilambangkan akhirnya diperoleh pada gambar yang utuh tentang permasalahan yang teliti.

Hasil penelitian dari pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2005 tentang Penyakit Masyarakat Judi dan Minuman Keras di Kecamatan Bunguran Barat tidak berjalan sesuai dengan peraturan tersebut, terdapat factor penghambat yang mengakibatkan tidak terealisasikan tujuan Peraturan Daerah tersebut.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Pokok Permasalahan	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN BUNGURAN BARAT

A. Geografis	14
B. Demografi Kecamatan Bunguran Barat	16
C. FISIOGRAFI	22
D. Administrasi Kecamatan Bunguran Barat dan Dasar Pelaksanaan Tugas	22

BAB III TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT JUDI DAN MINUMAN KERAS

A. Pengertian Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Penyakit Masyarakat Judi dan Minuman Keras	28
--	----

B. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penyakit Masyarakat Kabupaten Natuna	35
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Judi Dan Minuman Keras ...	38

BAB IV PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2005 KABUPATEN NATUNA TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT LARANGAN JUDI DAN MINUMAN KERAS DI KECAMATAN BUNGURAN BARAT

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Kabupaten Natuna Tentang Penyakit Masyarakat Larangan Judi Dan Minuman Keras Di Kecamatan Bunguran Barat	47
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat 2 Tentang Penyakit Masyarakat Judi Dan Minuman Keras Di Kecamatan Bunguran Barat	60
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan PERDA Nomor 10 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat 2 Tentang Penyakit Masyarakat Judi Dan Minuman Keras	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Rekomendasi	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai hasil penelitina penulis dengan judul Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Natuna No. 10 Tahun 2005 tentang penyakit masyarakat Judi dan Minuman Keras di Tinjau Hukum Islam (Study Kasus di Kecamatan Bunguran Barat) penulis dapat menyimpulkan:

1. Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2005 tentang penyakit masyarakat Judi dan Minuman Keras di kecamatan bunguran barat tidak berjalan sesuai dengan peraturan tersebut, dapat penulis simpulkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan.
2. Bahwa dalam Peraturan daerah Kabupaten natuna No. 10 Tahun 2005 tentang penyakit masyarakat judi dan minuman keras ditinjau hukum Islam tersebut terdapat faktor penghambat yang mengakibatkan tidak terealisasi tujuan peraturan daerah tersebut antara lain:
 - a. Sumber daya manusia kurang
 - b. Sarana dan prasarana sangat terbatas
 - c. Belum adanya tempat pengaduan yang jelas
 - d. Penerapan budaya kerja dari aparaatur negara yang masih kurang
 - e. Kurangnya informasi dan sosialisasi masyarakat
 - f. Kurangnya partisipasi dari masyarakat
 - g. Kurangnya tekanan publik dari pers, aktivis kampus, ormas, LSM
3. Tinjauan hukum pidana Islam yang dimuat pada Perda No. 10 tahun 2005 tentang pekat Kab. Natuna tersebut diatas dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu:
 - a. Hudud (Hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan kurangnya)
 - b. Ta'zir (Hukum yang diberi kebebasan bagi hakim untuk menentukannya).

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2005 tentang penyakit masyarakat khusus pada pasal 8 pasal 9 larangan judi dan minuman keras yang penulis teliti, maka saran untuk berbagai macam elemen, yaitu:

1. Kepada masyarakat Kabupaten Natuna khususnya Kecamatan Bunguran Barat agar lebih memperhatikan dan mengamalkan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Al- Qur'an dan as-sunnah dalam bertingkah laku baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
2. Kepada orang tua dan keluarga agar dapat memperhatikan anak-anaknya dengan membimbing, mengawasi dan memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya agar dapat berperilaku dan berpakaian sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
3. Kepada tokoh agama, lembaga pendidikan, cendikiaawan, dan lembaga swadaya masyarakat non pemerintah agar dapat membantu maraknya berbagai tindak perbuatan penyakit masyarakat khususnya pada minuman keras dan judi yang sedang berkembang saat ini.
4. Kepada pemerintah baik pusat maupun daerah agar dapat memperhatikan kesejahteraan rakyat dan kemerosotan moral bangsa yang makin lama semakin langka. Kemandirian penyelenggara dalam pelaksanaan Perda juga harus tercermin dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kemandirian penyelenggara dalam pelaksanaan guna terselenggaranya sosialisasi yang baik.
5. Kepada penegak hukum dan Perda yang berwenang agar dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya guna tercapainya tujuan dan keinginan yang dimaksud. Terpelihara kehormatan dan keselamatan manusia dunia akhirat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebagai suatu daerah yang sangat jauh dari pusat perkotaan dan jauh dari keramaian dan juga merupakan daerah yang baru berkembang, maka Kabupaten Natuna khususnya Kecamatan Bunguran Barat sangat rentan dengan tindak kriminal. Salah satu perbuatan yang atau pun tindak kriminal yang sering dilakukan warga disana adalah masalah judi dan minuman keras. Judi dan minuman keras di daerah ini sudah sangat menjamur sekali, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Bahkan anak-anak sekolah sudah mulai mengenal akan perbuatan ini.

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak kabupaten dalam memerangi penyakit masyarakat khususnya judi dan minuman keras yang dilakukan oleh pihak kecamatan melalui Satpol PP dengan melakukan razia di kafe-kafe, penginapan, hotel-hotel dan tempat-tempat karaoke. Namun hal ini belum semaksimal mungkin, karena ada faktor-faktor tertentu dalam pelaksanaannya.

Salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Bunguran Barat pada tanggal 24 Juni 2009 yaitu tertangkapnya 9 orang dalam penggerebekan di sebuah rumah makan, dalam penggerebekan itu mereka mengadakan permainan judi, salah satu yang tertangkap berstatus PNS. Untuk kasus minuman keras terjadi pada tahun 2005, dimana 3 orang pelajar minum

minuman keras oplosan dari spritus dan heineiken. Akibat perbuatan yang mereka lakukan, 2 orang pelajar tersebut setelah minum minuman keras meninggal dunia, dan 1 orang lagi dilarikan kerumah sakit terdekat dalam keadaan kritis.¹

Maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Natuna melalui anggota DPRD, dengan acuan undang-undang otonomi daerah yang berlaku, dimana sebagai bahan pedoman daerah berhak membuat dan membentuk peraturan daerah sendiri. Dengan melihat dari masalah yang terjadi maka pemerintah daerah membuat peraturan daerah yaitu PERDA No.10 Tahun 2005 tentang penyakit masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi maraknya tindakan kriminal akibat dari bahaya judi dan minuman keras yang semakin menjamur dikalangan masyarakat Kabupaten Natuna khususnya Kecamatan Bunguran Barat.

Padahal judi dan minuman keras itu merusak akhlak, moral dan jati diri bangsa, yang pada akhirnya menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, disamping telah melanggar larangan agama yang kelak akan mendapat dosa dan siksaan di akhirat nanti bila pelakunya tidak bertobat dan tidak diberlakukannya Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.²

Minum-minuman keras dalam jumlah banyak akan mengakibatkan peminum sempoyongan, bicara tidak jelas daya ingat dan kemampuan menilai

¹ Kassiyfal Ghammi Tb, (Selaku Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Sedanau Kec. Bungaran Barat, pada tanggal 08 Nopember 2009

² Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqiyah*, (Bandung : Penerbit Angkasa, 2005), h. 230

sesuatu terganggu untuk sementara waktu. Dalam jumlah lebih banyak lagi dapat menyebabkan koma bahkan kematian. Maka dari itu minuman keras atau khamar dapat mengakibatkan :

1. Gangguan kesehatan fisik
2. Gangguan kesehatan jiwa
3. Gangguan fungsi sosial
4. Gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat.³

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.⁴

Oleh karena itu, dalam menjalankan program kerja seorang kepala daerah haruslah bijak, karena suatu hal yang dilakukannya haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kenyataan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan dimana kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat.⁵

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan aman, tenteram, dan damai diperlukan suatu tata. Tata

³ Kol. Pol. M. Wresniworo, *Masalah Narkotika, Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya*, (Jakarta: Bina Dharma Pemuda Printing, 1999), cet.ke-1, h. 219

⁴ HAW Widjaja, *Penyelenggara Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), cet. ke-1, h. 25

⁵ Abu Ridha, *Karakteristik Politik Islam*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2004), h. 26

yang berwujud aturan yang menjadi pedoman bagi seluruh tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya lazim disebut kaidah atau norma. Norma mempunyai dua isi yang berwujud antara lain sebagai berikut:

1. Perintah merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu, oleh akibatnya dipandang baik.
2. Larangan merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu, olaeh karena akibatnya dipandang tidak baik.⁶

Banyak orang yang terkena gangguan saraf karena judi dan minuman keras, bahkan tega membunuh sesama manusia. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, judi (berkorban untuk) berhala, mengadu nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*⁷

Kebanyakan sifat manusia, barulah menyadari nilai nikmat yang dikaruniakan Allah apabila nikmat itu sudah hilang atau lepas dari padanya, yaitu dicabut Allah kembali. Andaikata rusak matanya sebelah atau kakinya terpotong, atau tangannya kudung, barulah ia merasakan sungguh-sungguh

⁶ Yulies Tiena Masriana, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3-4

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Cipta Media), cet. ke-1, h. 123

bagaimana nikmatnya mempunyai dua belah mata, betapa nikmatnya mempunyai kaki dan tangan yang sempurna.⁸

Begitu juga orang sakit, barulah insaf setelah mengetahui bagaimana nikmatnya sehat. Seseorang yang berkuasa dan berpangkat, apabila jatuh atau dipecat, hilang kekuasaan dan jabatan, barulah pada saat itu dirasakannya betul bagaimana nikmat memegang kekuasaan dan pangkat itu.⁹

Fenomena- fenomena seperti dipaparkan diatas tentu tidak boleh dibiarkan, akan menjadi apa kelak anak-anak jika dibiarkan dalam kondisi tersebut. Jika tidak dicarikan jalan keluarnya berupa peraturan dari pemerintah daerah, maka akan terbentuk generasi yang tidak bermoral atau berbudi pekerti rusak, jika generasi kini rusak, bagaimana dengan pemimpin bangsa dimasa yang akan mendatang.¹⁰

Telah dijelaskan dalam peraturan daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 tahun 2005 BAB III Kedudukan Dalam Hukum Pasal 8 yang berbunyi “*Pelarangan kepada setiap orang dan Badan untuk menyediakan, menyimpan, menerima, mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan, minuman keras tanpa izin serta meminum minuman keras di depan umum atau di tempat umum*”, dan pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “*Pelarangan setiap orang dan atau badan menyediakan fasilitas dan atau tempat perjudian dan berjudi dalam bentuk apapun*”, Sedangkan, dalam Pasal 303 bis ayat (1)

⁸ Achmad Sunarto, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Terang, 1999), h. 82-83

⁹ Drs. Asmaran As, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 224

¹⁰ Sam. M. Chan & Tuti T. San, *Analisis SWOT; Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005), cet. ke-1, h.19

KUHP “ Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau dapat izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu¹¹

Dalam tinjauan fiqh siyasah sebagaimana yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW, yaitu membentuk institusi eksekutif dan administrasi melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena hal ini terkait dengan pribadi muhammad SAW sebagai Rasulullah dan sekaligus sebagai seorang Kepala Negara.¹²

Berpegang teguh kepada ajaran yang tertuang dalam kitab suci al-Qur'an merupakan ciri seorang muslim. Artinya, dalam sebuah perilakunya ia harus tuliskan dengan syariat atau aturan yang datang dari Allah SWT, seperti digambarkan dalam Al-Qur'an surat al-A'raf ayat 170 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ
أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾

¹¹ KUHP dan KUHP, Dilengkapi dengan: UU No 27 Th.1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, (Jakarta: Sinar Gratika, 2007), cet. ke-7, h.105

¹² Djauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), cet. ke-1, h.

Artinya : *“Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al- Kitab (Taurat) serta mendirikan shalat (akan diberi pahala) karena sesungguhnya kami tidak menyalahkannya pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan”*¹³

Melalui program ini, judi dan minuman keras menjadi suatu permasalahan yang sangat besar dalam suatu daerah ada di fokuskan paling utama dalam pelaksanaan perda tersebut.

Dari latar belakang di atas kami merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dalam suatu kajian yang bersifat ilmiah dengan judul: **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT JUDI DAN MINUMAN KERAS DI TINJAU HUKUM ISLAM (Study Kasus di Kecamatan Bunguran Barat)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian terarah penulis membatasi permasalahan sekitar pelaksanaan Perda Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 2 Tentang Penyakit Masyarakat Judi dan Minuman Keras (Study Kasus di Kecamatan Bunguran Barat)

¹³ Departemen Agama, *op cit*, h. 172

C. Pokok Permasalahan

Dari batasan masalah di atas, dapat di simpulkan dan dirunuskan beberapa permasalahanantara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Natuna khusus pasal 2 ayat 2 tentang penyakit masyarakat larangan judi dan minuman keras di Kecamatan Bunguran Barat ?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2005 khususnya pada pasal 2 ayat 2 ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Natuna nomor 10 tahun 2005 khusus pada pasal 2 ayat 2 tentang penyakit masyarakat larangan judi dan minuman keras di Kecamatan Bunguran Barat ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah Nomor 10 tahun 2005 Kabupaten Natuna khusus pasal 2 ayat 2 tentang penyakit masyarakat yaitu larangan judi dan minuman keras di Kecamatan Bunguran Barat.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi peraturan daerah Nomor 10 tahun 2005 Kabupaten Natuna khusus pasal 2 ayat 2 tentang penyakit masyarakat larangan judi dan minuman keras di Kecamatan Bunguran Barat.

- c. Untuk mengetahui pandangan menurut hukum Islam terhadap peraturan daerah Kabupaten Natuna nomor 10 tahun 2005 khusus pada pasal 2 ayat 2 tentang penyakit masyarakat judi dan minuman keras di Kecamatan Bunguran Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini dapat berguna untuk :

- a. Untuk sumbangan berarti bagi pemikiran dan sistim pemerintahan di Indonesia khususnya kemajuan daerah Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna
- b. Untuk menambah wawasan penulis, dan wacana dalam bidang kejurusan dan bermanfaat di masyarakat
- c. Untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Natuna khususnya Kecamatan Bunguran Barat tentang masalah judi dan minuman keras.
- d. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau dengan gelar sarjana Hukum Islam. (S.H.I).

E. Metode Penelitian

1. Lokasi

Tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna

2. Subjek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang terdiri dari Bupati Natuna, Ketua DPRD Kab. Natuna, Pihak Kepolisian, Satpol PP, Camat Bunguran Barat, Lurah-lurah di Kecamatan Bunguran Barat, dan aparat desa beserta masyarakat tokoh-tokoh pemuda dan alim ulama. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penyakit Masyarakat larangan Judi dan minuman keras di Kabupaten Natuna (Study Khusus di Kecamatan Bunguran Barat)

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap mewakili populasinya.¹⁴ Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁵

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan unsur-unsur Kecamatan Bunguran Barat yaitu Pihak Kecamatan Bunguran Barat, Lurah dan Kepala Desa, Kapolsek, Anggota Satpol PP, Tokoh Masyarakat, Pemuda, alim ulama dan masyarakat Kecamatan Bungurann Barat. Sedangkan sampel dalam penelitian ini terdiri dari Camat Bunguran Barat (2 orang), KAPOLSEK Bunguran Barat (2 orang), lurah (1 orang), SATPOL PP Kecamatan (2 orang), 2 Kepala Desa dan 16 orang

¹⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), cet. ke-1, h. 60

¹⁵ Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), cet. ke-1, h. 109

masyarakat yang terdiri dari pemuda-pemuda masyarakat dan 5 orang tokoh-tokoh alim ulama, sampel tersebut diambil dengan cara *purposive sampling*. Jadi jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu Camat Bunguran Barat, KUA Bunguran Barat, KAPOLSEK Bunguran Barat, SATPOL PP, Kepala Desa dan masyarakat yang terdiri dari pemuda-pemuda masyarakat dan orang tokoh-tokoh alim ulama.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu MUI Kabupaten Natuna, DEPAG Kabupaten Natuna, buku-buku, internet, dan lainnya yang ada kaitan dengan penelitian ini, kedudukannya sebagai data penunjang dalam mengolah data.

5. Metode Pengumpulana Data

Untuk pengumpulan data yang besar dan akurat penulis menggunakan pengumpulan data antara lain:

- a. *Observasi*, yaitu penelitian langsung turun ke lapangan untuk meninjau dan melihat secara dekat permasalahan yang diteliti yaitu judi dan minuman keras.
- b. *Wawancara*, yaitu sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden secara langsung mengenai masalah yang di teliti yaitu judi dan minuman keras.

- c. *Angket*, yaitu pertanyaan secara tertulis yang dibagikan kepada responden terhadap masalah yang terjadi seputar penyakit masyarakat khususnya judi dan minuman keras.

6. Metode Analisa Data

Analisa data kualitatif, yaitu: dengan mengklasifikasikan data kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut. Kemudian diuraikan antara satu dengan yang lain dilsmbsngkan akhirnya diperoleh pada gambaran yang utuh tentang masalah yang teliti.

7. Metode Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, yaitu:

- a. Metode deduktif, yaitu dengan meneliti hal-hal yang bersifat umum, dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif, yaitu dengan memilih hal-hal yang terperinci yang bersifat khusus, dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan atau menceritakan data hasil penelitian kemudian data tersebut dianalisis.

F. Sistematika Penulisan

Dalam mengembangkan dan mengambil masalah yang ada dalam penelitian, maka terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan tentang sistematika penelitian antara lain sebagai berikut :

- BAB I** Dalam bab ini pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang lokasi penelitian terdiri dari: letak geografis dan demografis, jumlah penduduk, agama, tingkat pendidikan, mata pencarian di Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.
- BAB III** Dalam bab ini berisi tentang pengertian pemerintah daerah, pengertian penyakit masyarakat, khamar dan judi. Faktor penghambat dan pendukung pemerintah daerah dalam mengatasi penyakit masyarakat khamar dan judi dan tinjauan hukum Islam terhadap judi dan minuman khamar.
- BAB IV** Dalam bab ini berisi tentang PERDA No. 10 Tahun 2005 Kabupaten Natuna tentang penyakit masyarakat di Kecamatan Bunguran Barat dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan PERDA No. 10 Tahun 2005 Kabupaten Natuna tentang penyakit masyarakat larangan judi dan minuman khamar.
- BAB V** Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini. Bab ini merupakan bab penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BUNGURAN BARAT

A. Geografi

Kecamatan Bunguran Barat terletak di bagian timur laut wilayah Kabupaten Natuna. Pada gugusan pulau yang di kenal dengan Kepulauan Natuna dengan perbatasan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Utara
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Tiga
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Tengah
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Anambas.

Luas wilayah Kecamatan Bunguran Barat 13.962 km² terdiri dari 19 pulau, 3 pulau berpenghuni dan 16 pulau tidak berpenghuni. Pusat pemerintah berada di wilayah Kelurahan Sedanau. Jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten \pm 60 mil dengan desa terjauh \pm 14 mil dan desa terdekat \pm 7 mil.¹

B. Iklim

Secara umum iklim Kecamatan Bunguran Barat sama dengan kondisi iklim di kecamatan – kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Natuna. Yang mana kondisi iklim tersebut di pengaruhi tropika basah, suhu udara rata-rata 25°C. Dengan kisaran suhu terendah 22°C. Dan tertinggi 33°C. Kelembaban

¹ Monografi Kecamatan Bunguran Barat Kab. Natuna

udara berkisar antara 80- 85 %. Tekanan udara berada antara 1.008 mili bar pada bulan Desember sampai 1,002 mili bar. Penyinaran matahari hampir sepanjang tahun yaitu 32 –56 % kecepatan angin bervariasi 3,5 – 11,00 knot per jam.²

Keadaan angin dalam masa pancaroba (angin utara, angin barat, angin selatan dan angin tenggara) sering berubah-ubah, tinggi gelombang laut tidak bisa di pastikan, tiba-tiba saja ombak besar di luar perkiraan, sehingga sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan-kecelakaan di laut khususnya terhadap nelayan-nelayan dan kapal-kapal pengangkut barang kebutuhan masyarakat dan kegiatan pembangunan. Musim pancaroba tersebut terjadi pada bulan Agustus sampai dengan Januari dan Juni-Juli bertiup angin barat.

Pada bulan Maret, April dan Mei bertiup angin timur dan di kenal dengan musim timur. Pada musim ini terjadi musim kemarau, angin bertiup lembut dan laut berombak tenang, pada musim timur ini, aktivitas nelayan dan transportasi laut di laksanakan secara maksimal.³

C. Fisiografi

Kabupaten Natuna merupakan bagian paparan kontinental yang terkenal dengan nama paparan sunda. Pulau-pulau yang termasuk gugusan Kepulauan Natuna ini merupakan sisa-sisa ombak laut cina selatan atau penyatuan daratan prateria yang membentang dari semenanjung Malaysia bagian utara sampai

² *Ibid*

³ *Ibid*

Kepulauan Bangka. Wilayah Kecamatan Bunguran Barat sebagian besar dipisahkan oleh laut.⁴

Bentuk permukaan tanah di Kecamatan Bunguran Barat terdiri dari daratan rendah dan landai, terutama di kawasan pantai dengan kemiringan antara 2 % - 5 %. Luas wilayah datar dan bukit sebesar 25 % berikut sampai bergunung 10 %, penggunaan tanah pada umumnya hanya untuk pertanian dan perkebunan sedangkan kawasan perumahan sebagian besar berada di pesisir pantai.⁵

D. Administraasi Kecamatan Bunguran Barat Dasar Pelaksanaan Tugas

1. Visi dan Misi Kecamatan Bunguran Barat Natuna

a. Visi Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.

”Salah satu pusat pemerintahan ekonomi di Kabupaten Natuna melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang di dukung oleh sumber daya alam manusia yang handal untuk mewujudkan masyarakat madani tahun 2020”.

b. Misi Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna

Merupakan satu gambaran kegiatan yang akan di lakukan dalam rangka mencapai suatu visi, selanjutnya dijadikan suatu pedoman dalam penyusunan strategi, prioritas kebijakan penyusunan program dan pengalokasian sumber daya dan searah untuk maksud tersebut, maka

⁴ Data Kecamatan Bunguran Barat Kab. Natuna

⁵ *Ibid*

misi pembangunan pemerintahan Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut⁶ :

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana dan pembangunan wilayah.

Maka yang terkandung dalam masing-masing visi tersebut adalah :

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas antara lain.
 - a) Taat melaksanakan agama serta menjadikannya landasan moral dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - b) Memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan dapat menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan dan perluasan pendidikan dan budaya yang relevan dengan pembangunan daerah
 - c) Memiliki derajat kesejahteraan kesehatan (jasmani dan rohani) memiliki keterampilan kerja dan ingat kesejahteraan yang memadai, sehingga dapat berperan dalam membangun daerah terutama mendukung pembangunan sekitar industri berbasis komoditi perikanan kelautan dan komoditi perkebunan.
 - d) Sumber daya aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat secara profesional, berdayaguna dan produktif

⁶ *Ibid*

- e) Sumber daya manusia yang produktif, kreatif, inovatif dan berketerampilan.
- 2) Mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan yang di maksud sebagai berikut :
- a) Adanya landasan ekonomi yang kuat bagi pemerintahan ekonomi yang berbasis kekuatan ekonomi. Meningkatkan dan meratanya pendapatan masyarakat dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor industri perkebunan dan sub sektor perikanan.
 - b) Meningkatkan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan terencana serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, guna mendukung percepatan pengembangan industri perikanan kelautan dn perkebunan.
 - c) Berkembangnya usaha kecil menengah dan koperasi yang didukung pengusaha besar melalui kemitraan yang saling menguntungkan.
 - d) Meningkatkan pemberdayaan potensi sumber daya daerah secara bijaksana dan terencana guna mendukung industri perikanan dan perkebunan.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan wilayah, misi ini dimaksud :
- a) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi antar wilayah guna mendukung percepatan upaya perkembangan sektor industri

perikanan kelautan dan perkebunan (sub sektor perikanan kelautan dan sub sektor perkebunan)

- b) Meningkatkan pengembangan potensi wilayah melalui pengembangan ekonomi wilayah, pengembangan wilayah strategi, pengembangan pedesaan dan perkotaan, pengembangan perumahan / pemukiman, pengembangan wilayah tertinggal serta penataan ruangan.

2. Administrasi Pemerintahan Kecamatan Bunguran Barat

Kecamatan Bunguran Barat secara administrasi pemerintahan terdiri dari satu Kelurahan dan 8 (delapan) desa. Dari delapan desa tersebut ,terdapat 3 (tiga) desa pemungkinan transmigrasi dengan perincian sebagai berikut:⁷

- a. Kelurahan Sedanau
- b. Desa Sedanau Timur
- c. Desa Mekar Jaya
- d. Desa Batubi Jaya
- e. Desa Gunung Putri
- f. Desa Sederajat Baru
- g. Desa Binjai
- h. Desa Pian Tengah
- i. Desa Semedang⁸

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

TABEL 1
LUAS KECAMATAN BUNGURAN BARAT
DIPERINCI MENURUT DESA / KELURAHAN DAN JARAK KE IBU
KOTA KECAMATAN TAHUN 2009

No	Desa/Kelurahan	luas wilayah	Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Mil)
1	Sedanau	105 km ²	0
2	Sedanau Timur	550 km ²	12
3	Mekar Jaya	37 km ²	7
4	Batubi Jaya	5.390 km ²	9
5	Gunung Putri	7.439 km ²	8
6	Sedanau Baru	55 km ²	7
7	Binjai	55 km ²	14
8	Pian Tengah	36 km ²	6
9	Semedang	10 km ²	13

Sumber Data : Kantor Kecamatan Bunguran Barat 2009

Dari data Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa desa yang terluas di Kecamatan Bunguran Barat adalah Desa Gunung Putri, dengan luas wilayah 7.439 km². Kemudian desa yang tersempit berada di desa Semedang 10 km² Kecamatan Bunguran Barat.

C. Data Dinas / Instansi Kecamatan

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Bunguran Barat telah terdapat dinas / instansi. Berkat adanya kerjasama antar dinas / instansi tersebut maka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan

pelayanan masyarakat pada umumnya dapat berjalan dengan baik, data dinas / instansi tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

TABEL 2
DATA DINAS / INSTANSI KECAMATAN BUNGURAN BARAT
TAHUN 2009

NO	Dinas / INSTANSI	Alamat
1	Kantor Kecamatan Bunguran Barat	Jl. Jenderal Sudirman Sedanau
2	Kantor Kepolisian Sektor Bunguran Barat	Jl. Panglima Hujan Sedanau
3	Kantor Koramil Bunguran Barat	Jl. Jenderal Sudirman Sedanau
4	Kantor Pos Pembantu TNI AL Sedanau	Jl. Jenderal Sudirman Sedanau
5	Kantor KUA Kecamatan Bunguran Barat	Jl. Puser Sedanau
6	Kantor UPTD Pendidikan Kec. Bunguran Barat	Jl. Jenderal Sudirman Sedanau
7	Kantor UPTD Perikanan & Kelautan Kec. B.B	Jl. Kusuma Bangsa Sedanau
8	Kantor POS Sedanau	Jl. Panglima hujan Sedanau
9	Kantor Gudang Bulog Sedanau	Jl. Jenderal Sudirman Sedanau
10	Kantor PT PLN Sub Ranting Sedanau	Jl. Panglima hujan Sedanau
11	Kantor Satker Pelabuhan Sedanau	Jl. Jenderal Sudirman Sedanau
12	Puskesmas Percontohan Sedanau	Jl. Jenderal Sudirman Sedanau

Sumber Data : Kantor Kecamatan Bunguran Barat 2009

Dari tabel di atas maka dapat kita ketahui bahwa di Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna terdapat 12 instansi/dinas di lingkungan Kecamatan tersebut.

TABEL 3
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT KECAMATAN
BUNGURAN BARAT
TAHUN 2009

NO	DESA/KEL	Jumlah Pendidikan Menurut Agama						J/ (JIWA)
		I	K/ P	K/ K	H	B	Lainnya	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kel. Sedanau	576	78	38	0	344	0	6227
2	DS. SDN TIMUR	357	0	0	0	0	0	357
3	DS. Mekar Jaya	428	0	0	0	0	0	428
4	DS. Batubi Jaya	137	182	0	0	8	0	1565
5	DS. Sedarat Baru	113	177	0	16	0	0	1331
6	DS. G, Putri	578	0	5	0	0	0	583
7	DS. Binjai	617	0	0	0	0	0	617
8	DS. Pian Tengah	527	0	0	0	4	0	531
9	DS. Semedang	272	0	0	0	0	0	278
JUMLAH								11917

Sumber Data : Kantor Kecamatan Bunguran Barat 2009

Dilihat dari tabel 3 di atas maka dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menurut agama Islam terbanyak adalah desa Binjai, Kristen Protestan terbanyak didesa Batubi Jaya, Kristen Katolik terbanyak didesa sedanau, hindu terbanyak di desa Sedarat Baru dan Budha juga terbanyak di desa Sedanau.

TABEL 4**JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak/Belum Sekolah	1687	14.15
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	2258	18.94
3	Tamat SD/Sederajat	3654	30.66
4	SLTP/Sederajat	1951	16.37
5	SLTA/Sederajat	2074	17.40
6	Diploma I/II	96	0.80
7	Akademi Diploma III	74	0.62
8	S I	121	1.06
9	S II	2	0.02
JUMLAH		11917	100%

Sumber Data : Kantor Kecamatan Bunguran Barat 2009

Tingkat pendidikan Masyarakat Kecamatan Bunguran Barat Beragam sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing. Kesadaran masyarakat Kecamatan Bunguran Barat tentang pentingnya pendidikan anak, baik dibidang umum atau Agama, Sewasta atau Negeri sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel di atas. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Tingkat pendidikan Masyarakat Kecamatan Bunguran Barat Beragam sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing sesuai keadaan ekonomi keluarga. Ada yang sanggup ke perguruan tinggi dan ada juga yang hanya sampai SD, bahkan ada yang tidak sampai tamat sekolah dasar

Dilihat dari tabel 4 di atas tentang jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat kita ketahui masyarakat Kecamatan Bungaran Barat terbanyak adalah tamat SD/Sederajat yaitu sebanyak 3654 orang atau 30.66% dari jumlah penduduk wilayah tersebut.⁹

⁹ *Ibid*

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KHAMAR DAN JUDI

A. Pengertian Pemerintah Daerah

Mengenai pemerintah daerah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa "Wilayah Indonesia dibagi menjadi atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam mengatur bentuk dan susunan pemerintah daerah ini harus diingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.¹

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan (Medebewind), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

¹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

B. Pengertian Penyakit Masyarakat Khamar dan Judi

1. Pengertian Khamar/ Minuman Keras

Khamar/minuman keras sudah lama dikenal di Indonesia, sejak zaman kerajaan Hindu. Masuknya agama Islam membawa pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat. Ajaran agama Islam melarang minuman keras. Dibeberapa wilayah Indonesia berbagai jenis minuman keras tradisional, dibuat dari berbagai macam bahan yang berbeda-beda seperti, brem, saguar, yoak, arak. Bahan pembuat minuman dari air nira bunga kelapa aren. Peminumnya bukan hanya rakyat kecil, tetapi bangsawan, pemuka adat. Batasnya dikaitkan dengan peristiwa adat, perhelatan, pesta kampung, pesta keluarga.³

Khamar/minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan baik jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berpikir kejiwaan, sehingga akibat lebih

² Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), cet. ke-1, h. 38

lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitarnya.⁴

Masalah minuman keras akhir-akhir ini telah menimbulkan masalah yang mengganggu kondisi ketertiban dan keamanan masyarakat. Kejahatan dengan kekerasan, seperti perampokan, penganiayaan. Pembunuhan pelakunya biasanya menggunakan minuman keras, sebelum melakukan tindakan pidana.⁵

Perkembangan industri minuman yang mengandung alkohol telah mendunia dalam berbagai jenis merk dan kadar kandungan alkoholnya, bahkan beberapa jenis makanan kecil, roti, permen gula-gula juga tidak lepas dari penggunaan bahan alkohol sebagai campuran penyedap rasa. Minuman keras yang di kemas dalam berbagai model, botol kecil, plastik, kertas di rancang untuk menarik pembeli. Hasil cipta budaya manusia semakin berkembang dengan cepatnya, namun pada sisi lain selalu membawa dampak positif dan negatif.⁶

Menyadari akan bahaya pengaruh alkohol bagi tubuh manusia bila disalahgunakan, maka tatanan pengaturan pengawasan dan pengendalian memang di perlukan. Hal ini di sadari oleh bangsa-bangsa di muka bumi

⁴ M. Wresnimitro dkk, Masalah Narkotika, psikotropika dan Obat-obat berbahaya, (Jakarta: Bina Darma Pemuda Printing, 1999), cet. ke 1, hal.214

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

ini. Namun kadang-kadang kepentingan ekonomis lebih menonjol dari pada kepentingan keselamatan umat manusia.⁷

Kemajuan di bidang industri antara lain berdirinya pabrik minuman keras secara legal selain mempunyai dampak positif yaitu menambah lapangan kerja, juga membawa dampak negatif yaitu di bidang pemakaian minuman keras.⁸

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan R. I. Nomor: 86/Men. Kes / Per / IV / 77, yang di maksud dengan minuman keras adalah : ” Semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat, yang meliputi : Minuman keras Gol. A, minuman keras Gol. B, dan minuman keras Gol. C”.⁹

a. Minuman Keras Golongan A

Adalah minuman keras dengan kadar Ethanol (C_2H_5OH) dari 1% sampai 5%, antara lain :

- 1) Bintang Baru Bir : Isi 330 ml/botol
- 2) Champido Anggur Buas : Isi 290 ml/botol
- 3) Green Sand : Isi 296 ml/botol
- 4) Sam Miguel : Isi 1000ml/botol
- 5) Jinro (Korean Ginseng Wine) : Isi 720 ml/botol
- 6) Tiger Lager Beer : Isi 64ml/botol
- 7) Anker Bir : Isi 330 ml/botol

⁷ *Ibid*, h. 215

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

- 8) Heineken Bier : Isi 330 ml/botol
- 9) Wolf (Ginness Foreign Extras Stout) : Isi 330 cc/botol
- 10) Baby Beer : Isi 100 ml/botol¹⁰

b. Minuman Keras Golongan B :

Adalah minuman keras dengan kadar ethonal lebih dari 5% dengan 20%, antara lain :

- 1) Anggur Malaga : Isi 350 cc/botol
- 2) Anggur Koleson cap 39 : Isi 600 l/botol
- 3) Whisky (Asoka pelikan) : Isi 1000 cc/botol
- 4) Kucing anggur ketan hitam : Isi 650 cc/botol
- 5) Lengkeng port Intisari : Isi 750 cc/botol
- 6) 5 klosen (anggur beras kencur) : Isi 650 ml/botol
- 7) Mohoni (Anggur) : Isi 300 cc/botol
- 8) Malaga : Isi 650 cc/botol
- 9) Mc. Donald (arak koleson) : Isi 650 ml/botol
- 10) Orang Tua Anggur : Isi 620 ml/botol¹¹

c. Minuman Keras Golongan C :

Adalah minuman keras dengan kadar ethonal lebih dari 20% sampai dengan 55%, antara lain :

- 1) Kuda Mas (Brendi) : Isi 620 cc/botol
- 2) Kuda Pacu Jenever : Isi 600 cc/botol
- 3) Mansion House (Brendy PSOP) : Isi 720 ml/botol

¹⁰ *Ibid*, h. 216

¹¹ *Ibid*

- 4) Mc. Donald (Brandy) : Isi 650 ml/botol
- 5) Orang Tua Arak : Isi 620 ml/botol
- 6) Scotch Brandy : Isi 620 cc/botol
- 7) Sea Hors (Brandy) : Isi 725 cc/botol
- 8) Stevenson (Brandy) : Isi 600 ml/botol
- 9) T.K.W. Brandy : Isi 325 cc/botol
- 10) Wincarno Anggur : Isi 640 cc/botol.¹²

Sedangkan Pengertian Khamar (minuman keras) menurut Persepektif Islam) adalah jenis minuman yang mengandung alkohol, tidak peduli berapa kadar alkohol di dalamnya. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa bahwa setetes saja dalam minuman hukumnya sudah haram. Islam mengharamkan khamar atau minuman keras itu karena dapat merusak akal, larangan ini tertuju pada setiap minuman keras yang potensial dapat memabukkan dan biasanya memang dipergunakan untuk mabuk-mabukkan. Apakah peminum benar-benar mabuk atau tidak, tetap haram. Dalam hadits Anas Bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu majah dan Turmuzi diriwayatkan sebagai berikut:

¹² *Ibid*

Maksudnya: “Bahwa Allah SWT akan melaknat tentang persoalan khamar dalam sepuluh hal, yakni: pembuatannya, penjualannya, peminumnya, pembawanya, pengirimkannya, penuangkannya, penjualannya, pemakan hasil penjualannya, pembelannya dan pemesannya”.

Secara legalitas banyak ayat-ayat dan hadis yang mengangkat hal-hal ini, antara lain surat Al - Maidah ayat 90 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: ”Hai orang – orang yang beriman sesungguhnya (minum) khamar, berjudi (berkorban) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk kekuatan syetan, maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.¹³

Di dalam ayat tersebut di atas Allah SWT tidak mengungkapkan secara tegas tentang sanksi hukuman pidana minuman keras, akan tetapi ketegasan sanksi itu diungkapkan dalam hadis sebagai berikut :

Maksudnya: *Nabi telah menjilid dan memukul peminum khamar itu dengan pelepah khamar dan sandal demikian pula Abu Bakar telah menjilid empat puluh kali jilid.*” (Riwayat Muslim)¹⁴

Apapun macamnya suatu makanan dan minuman, jika benar – benar memabukkan tanpa diragukan lagi, maka ia disebut arak, apapun bahannya dan mereknya, sebab Islam hanya melihat akibat yang berbahaya yang ditimbulkannya. Jadi, makanan dan minuman itu dengan nyata dan jelas memabukkannya, meski terbuat dari perasan gandum, atau madu, atau juga anggur, maka hukumnya haram. Sebab Nabi SAW bersabda :

”Semua yang memabukkan berarti arak dan setiap arak adalah haram” (HR. Bukhori dan Muslim)

Umar, juga pernah berkata: *”Bahwa setiap (makanan atau minuman) yang bisa menutupi (menghilangkan) pikiran disebut arak.* (riwayat Bukhori dan Muslim)¹⁵

Islam telah melarang meminum arak. Larangan ini, mutlak berlaku tanpa memandang kadar banyak dan sedikitnya arak. Minum arak sedikit tetap dilarang oleh Islam, sebagaimana halnya meminum

arak dalam kadar yang banyak sekali. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda :

”Minuman apapun kalau banyaknya itu memabukkan, maka (minum) sedikit (dari minuman itu) juga haram”. (H.R Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi)¹⁶

2. Pengertian Judi

a. Menurut Bahasa

Maisir dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian diantaranya ialah : Lunak, tunduk, harusan, mudah, gampang.¹⁷ Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari “*yasara*” yang artinya keharusan. Makna ini mengingatkan kita kepada adanya keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir/judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.¹⁸

Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah, dengan analisa bahasa maisir/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rizki yang mudah,

¹⁶

¹⁷ H. Mahmud Yunus, Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), cet. ke-7, h. 509

¹⁸ Ibrahim Hosen LML, *Apakah Judi itu ?*, (Jakarta: IIQ, 1987), cet. ke-1, h. 25

tanpa susah payah.¹⁹ Analisa ini menurut hemat saya tidak tepat. Sebab untuk menang dalam permainan maisir/judi adalah tidak mudah, kalau tidak dikatakan sangat sulit.

b. Menurut Rumusan Para Ulama

Sepanjang buku-buku yang sempat saya baca (telaah) terdapat berbagai rumusan pengertian maisir/judi sebagai berikut:

Judi adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan, sehingga dengan mudah seseorang mendapat keuntungan. Para ulama fikih mendefinisikan *judi* atau *maisir* sebagai "suatu permainan yang menjanjikan keuntungan tanpa melalui cara yang wajar sebagaimana yang dituntunkan syara' (hukum Islam).²⁰

Sedangkan menurut penulis yang dimaksud dengan judi adalah Permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan baik secara langsung maupun tidak langsung antara dua atau lebih pemainnya.

C. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2005 Tentang Penyakit Masyarakat Kabupaten Natuna

Sebagaimana dalam Bab II Ruang Lingkup disebutkan Pasal 2 :

1. Perihal Penyakit Masyarakat yang mencangkupi dalam Peraturan Daerah ini dapat berbentuk perbuatan, perilaku serta tindakannya.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 417

2. Segala Perbuatan perilaku serta tindakan yang di maksud dalam ayat (1)

pasal ini meliputi :

- a. Prostitusi
- b. Zina
- c. Homo Sex
- d. Lesbian
- e. Sodomi
- f. Penyimpangan Seksual Lainnya
- g. Judi**
- h. Minuman Keras**
- i. Narkotika

Adapun penegasan dalam perda ini tentang penyakit masyarakat khususnya Judi dan Minuman Keras tertera pada pasal 8 yang berbunyi ;

”Pelarangan kepada setiap orang, Badan untuk menyediakan, menyimpan, menerima, mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan minuman keras tanpa izin serta meminum keras di depan umum dan atau di tempat umum”..

Dan Pasal 9 ;

”Pelarangan setiap orang atau Badan menyediakan fasilitas dan atau tempat perjudian dan berjudi dalam bentuk apapun”

Kemudian dalam BAB VII Ketentuan Pidana dalam pasal 17 :

Penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini dilakukan sebagaimana di atur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana dan Hukum Pidana tentara sebagaimana di atur dalam dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kemudian Pasal 18

1. Barang siapa melakukan Penyakit Masyarakat yang tidak diatur oleh peraturan daerah ini di ancam Hukuman Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undang yang berlaku.
2. Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah)²¹

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khamar dan Judi

Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan oleh islam, tetapi ia juga mengharamkan setiap permaianan yang dicampuri perjudian, yaitu permaianan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemaian. Hukum Islam telah mengharamkan judi secara *qath'i dilalah* sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, judi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah

²¹ Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2005 Tentang Penyakit Masyarakat Kabupaten Natuna

*adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan.*²²

Oleh karena itu, tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun.²³

Islam, dibalik larangannya ini terkandung suatu hikmah dan tujuan yang tinggi sekali, yaitu:

1. Hendaknya seorang muslim mengikuti sunnatullah dalam bekerja mencari uang. Dan mencari dengan dimulai dari pendahuluan-pendahuluannya. Sedangkan judi di dalamnya dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada pembahagian, sedekah dan angan-angan kosong; bukan bergantung kepada usaha, aktivitas dan menghargai cara-cara yang telah ditentukan Allah, serta perintah-parintah-Nya yang harus dituruti.
2. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. Oleh karna itu tidak boleh diambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar-menukar sebagai mana yang telah disyaratkan atau dengan jalan judi, adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara yang bathil.
3. Tidak mengherankan, kalau perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri, kendati nampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan. Sebab bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah, yang dirampas dan

22

²³ M. Yusuf Qardhawi, *loc cit*, h. 418

yang merampas. Sedang yang kalah apabila diam, maka diamnya itu penuh dengan kebencian dan mendongkol karena taruhannya itu sial. Kalau dia ngomel, maka dia mengomeli dirinya sendiri karena derita yang dialami dan tangannya yang menaruhkannya dengan membabi-buta, dan sebagainya.

Menurut H.S Muhclis yang dikutip dari buku Masali fiqhiyah karangan H. Masjfuk Zuhdi, ada dua unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi, ialah:

1. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.²⁴

Menurut hemat penulis, lebih cenderung pada pendapat para ulama pada umumnya yang mengharamkan segala macam bentuk perjudian. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Artinya: *”Menolak kerusakan diutamakan dari pada menarik masalah dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah maka didahulukan adalah menolak mafsadahnya”*²⁵

²⁴. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung , 1993), cet. ke-4, h. 142

²⁵ Muhsin Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; (Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), cet. ke-2, h. 137

Bahaya Judi Kalau diteliti kitab-kitab tafsir hampir semuanya mengatakan bahwa sebab turunnya ayat-ayat yang mengharamkan judi ialah karena orang-orang arab ketika itu berjudi secara lotere dengan hadiah-hadiah daging daging unt bagi yang menang.²⁶ Kemudian kalau kita perhatikan alasan yang menyebabkan turunnya keharaman minuman keras dan perjudian (illat hukumnya) dalam surah al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ وَالْمَيْسِرَ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Hai oarang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minuman khamar dan berjudi itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat apakah kamu tidak mahu berhenti."

Dalam ayat tersebut diatas , kita dapat menemukan dua hal:

1. Alasan kemasyarakatan (*Ijtima'iyah*), yakin minuman keras dan berjudi itu bisa menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian di masyarakat yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerawanan sosial.

²⁶ Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1997), cet. ke-10 Jilid IV, h. 58

2. Alasan keagamaan (*Diniyah*), yakni minuman dan berjudi itu bisa menyebabkan orang lupa akan kewajiban-kewajibannya terutama kewajibannya kepada Allah, seperti shalat dan sebagainya.²⁷

Kemudian Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya memberikan penjelasan tentang ayat di atas, ”hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya khamar yang kalian minum, judi yang kalian lakukan, binatang-binatang ternak yang kalian kurbankan untuk berhala untuk berhala, dan anak-anak panah yang kalian gunakan untuk mengundi nasib, adalah perbuatan dosa yang dimurkai dan dibenci Allah. Ia adalah melakukannya. Ia bukan perbuatan yang di sunnatkan Tuhan kalian kepada kalian, nukan pula yang di ridhai-Nya.”²⁸

Kalau kita perhatikan secara obyektif pelaksanaan lotere/undian berhadiah/kupon berhadiah lainnya selama ini seperti Lotto, Nalo, Siji, dan porkas atau permainan judi lainnya seperti bilyar, domino, remi, maka kita dapat melihat dampaknya yang sangat negatif terhadap kehidupan bangsa dan negara, sehingga hasil pembangunan material dan spiritual yang dicapai dengan dana hasil judi dan sebagainya tidak ada artinya.

Mengingat *mafsadah*-nya sudah jelas lebih banyak daripada masalahnya, maka *saddu al-dzari’ah* sudah cukup untuk mengharamkan segala macam perjudian. *sadddu al-dzari’ah* (menutup jalan yang bisa mengantarkan orang kedalam hal-hal yang dilarang oleh agama, menurut

²⁷ M. Rasyid Ridha, *loc cit*, Juz VII, h. 62-63

²⁸ Ahmad Mustafa al- Maraghi, *Terjemahan Tafsir al- Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1887), Juz VII, h. 36

pengertian *jumhur*) dapat di pakai sebagai dalil *syar'i*, menurut kebanyakan fuqaha. Hanya mazhab Dzahiri yang menolak *saddu al-dzari'ah* sebagai dalil *syar'i* dengan alasan, bahwa kita cukup menghindari hal-hal yang belum jelas hukumnya (*syubhab/mutasyabihat*), agar tidak jatuh ke dalam hal-hal yang terlarang/haram.²⁹

Adapun yang dimaksud dengan perlombaan berhadiah, ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti bergulat atau lomba lari, atau adu keterampilan/ketangkasan seperti badminton/sepak bola, atau adu kepandaian seperti main catur.³⁰

Pada prinsipnya lomba semacam tersebut di atas diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa. Dan mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan agama., jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut³¹:

1. Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang.
2. Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat ikalahkan oleh lawannya itu.
3. Jika uang/hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai *muhalil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambilkan uang

²⁹ Msjful Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: Masagung, 1987), cet. ke-3, h. 96

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, h. 97

hadiah itu, jika jagonya menang; tetapi ia tidak harus membayar, jika jagonya kalah.³²

Memang, judi bisa membuat orang-orang yang menjadi kaya. Tetapi, ia juga bisa memeras orang-orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk perama kali akan merasa terpanggil untuk mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan-kesempatan yang lain. Kadang-kadang, kemenangan itu tidak pernah diperolehnya hingga hartanya tidak tersisa sama sekali. Tak Pelak, setelah itu dia akan menjadi orang yang fakir miskin, kemudian menjadi musuh berat bagi mereka yang telah menang atasnya.³³

Fakta telah menunjukkan, bahwa judi merupakan perbuatan yang paling banyak menyibukkan hati dan memalingkan daari hal selainnya. Bahkan, jika terjadi kebakaran dirumah si penjudi atau keluarga, dan anaknya tertimpa musibah, lalu dia diminta tolong, maka dia tidak akan menolongnya, malah terus bermain.

Di samping itu, apabila si penjudi ingat akan shalat, lalu meninggalkan main karena hendak melaksanakannya dengan khusyu', walau sedikitpun kecil hanya gerakan-gerakan saja. Tapi, walau bagaimanapun, orang yang mabuk lebih parah dari itu. Sebab, dia sama sekali tidak mengetahui dengan tepat perbuatan-perbuatan shalat.³⁴

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: al- Ma'arif, 1997), Jilid III, h. 372-373

³³ Ahmad Mustafa al – Maraghi, *loc cit*, h. 37

³⁴ *Ibid*

BAB IV

PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2005 KABUPATEN NATUNA TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT LARANGAN JUDI DAN MINUMAN KERAS DI KECAMATAN BUNGURAN BARAT

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Kabupaten Natuna Tentang Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Bunguran Barat

Adapun untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Kabupaten Natuna tentang penyakit masyarakat khususnya tentang khamar dan judi di Kecamatan Bunguran Barat dapat kita lihat pada tabel-tabel di bawah ini.

TABEL 1

Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Daerah Turut Berperan Serta Dalam Menanggulangi Segala Perbuatan Penyakit Masyarakat Yaitu Khamar dan Judi

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	20	66.67
2	Kurang Setuju	5	16.67
3	Tidak Setuju	3	10
4	Tidak Tahu	2	6.67
Jumlah		30	100 %

Bila dilihat dari tabel 1 di atas dapat di ketahui bahwa tanggapan responden tentang Pemerintah Daerah turut berperan serta dalam menanggulangi segala perbuatan penyakit masyarakat yang menjawab sangat setuju 20 orang atau 66.67 %, yang menjawab kurang setuju 5 orang atau 16.67

%, yang menjawab tidak tahu 3 orang atau 10%, yang menjawab tidak tahu 2 orang atau 6.67 %.

Jika dilihat dari hasil tabel di atas maka dapat kita ketahui bahwa responden lebih banyak menjawab sangat setuju jika Pemerintah Daerah turut berperan serta dalam menanggulangi segala perbuatan penyakit masyarakat khususnya tentang khamar dan judi.

Menurut M. Thalib beliau mengatakan bahwa khamar dan judi memang membutuhkan sebuah pengaturan yang tegas dari Negara khususnya Pemerintah Daerah, Persoalannya tak bisa diselesaikan di tingkat masyarakat, sekalipun mekanisme kontrol masyarakat sangat penting sebagai tindakan preventive. Tindakan khamar dan judi tak bisa dibiarkan begitu saja, karena bisa berdampak jauh kepada moralitas generasi masa depan.¹

TABEL 2
Tanggapan Responden Tentang Perda Pekat No. 10 Thn 2005 di
Kabupaten Natuna Telah Berjalan Dengan Baik dan Sesuai
Dengan Kaidahnya

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya	4	13.33
2	Tidak	15	50
3	Ragu-ragu	2	6.67
4	Tidak Tahu	9	30
Jumlah		30	100

¹ M. Thalib, (Selaku Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 16 April 2010

Bila dilihat dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang Perda Pekat No.10 Thn. 2005 di Kabupaten Natuna telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kaidahnya yang menjawab ya 4 orang atau 13.33 %, yang menjawab tidak 15 orang atau 50 %, yang menjawab ragu-ragu 2 orang atau 6.67%, yang menjawab tidak tahu 9 orang atau 30%.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa, responden berpendapat tidak tahu tentang Perda Pekat No.10 Thn. 2005 di Kabupaten Natuna seperti yang diungkapkan saudara M. Fadhly beliau mengatakan bahwa dimasyarakat Kec. Bunguran Barat mereka tidak tahu bahwa PEMDA telah menetapkan peraturan tentang penyakit masyarakat. Sehingga jika ada yang minum-minuman keras dan berjudi, kami tenang-tenang saja walaupun dalam tingkat yang kecil. Sepengetahuan saya tidak ada tindakan dari pemerintah daerah.²

Sementara berdasarkan penelitian penulis, responden yang mengatakan tahu tentang Perda Pekat No.10 Thn 2005 di Kabupaten Natuna hanya sedikit saja, mereka termasuk kedalam golongan PNS dan aparat negara. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kec. Bunguran Barat tidak banyak tahu tentang Perda pekat tersebut. Selanjutnya kalau saat responden ditanya tentang khamar dan judi yang dilakukannya, maka responden menjawab sebagaimana dalam tabel selanjutnya.

Adapun pelanggaran jenis pelanggaran yang terjadi yang berhubungan dengan Perda Pekat No. 10 Thn. 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

TABEL 3

² M. Fadhly, (Selaku Pemuda Kampung), wawancara, Sedanau Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 16 April 2010

Tanggapan Responden Terhadap Pelanggaran Apa Saja Yang Terjadi Yang Berhubungan Dengan Perda Pekat No. 10 Thn 2005

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Judi dan Miras	24	80
2	Prostitusi	2	6.67
3	Homo sex dan Lesbian	1	3.33
4	Dan lain-lain	3	10
Jumlah		30	100

Bila dilihat dari tabel 3 di atas dapat di ketahui bahwa tanggapan responden terhadap pelanggaran apa saja yang terjadi yang berhubungan dengan perda pekat No. 10 Thn 2005 yang menjawab judi dan miras 24 orang atau 80 %, Seperti kata Bapak H. Abdullah beliau mengatakan, jenis pelanggaran yang sering terjadi di daerah ini adalah khamar dan judi. Khamar biasanya dilakukan oleh sekelompok anak-anak muda, dan biasanya lebih marak lagi apabila ada hiburan keyboard. Sedangkan untuk judi sangat sulit menghilangkan kebiasaan penyakit masyarakat ini, karena kadang perbuatan tersebut sangat mencolok dihadapan kita, lalu kita tidak mampu mencegahnya, akhirnya tindakan tersebut semakin sulit untuk dimusnahkan.³

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Irwanto, beliau mengatakan minum-minuman keras dan judi ini sudah tidak asing lagi di tellinga masyarakat, karena orang melakukan tidak hanya secara sembunyi-sembunyi bahkan sudah berani secara terang-terangan. Ini kadang-kadang

³ Abdullah, (Selaku Kepala Desa Binjai), *wawancara*, Mekar Jaya Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 17April 2010

membuat kita merasa tidak nyaman, tetapi tingkah laku mereka tidak berubah.⁴

Selanjutnya responden yang mengatakan pelanggaran Perda Pekat No. 10 Thn 2005 yang terjadi adalah prostitusi yang menjawab protitusti 2 orang atau 6.67 %, yang menjawab homo Sex dan Lesbian 1 orang atau 3.33%, yang menjawab Dan lain-lain 3 orang atau 10%.

Sementara untuk mengetahui sanksi yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna terhadap pelaku penyakit masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 4
Tanggapan Responden Terhadap Sanksi Yang Diberikan
Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Terhadap Pelaku Penyakit
Masyarakat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Kurungan	1	3.33
2	Denda	9	30
3	Diasingkan	2	6.67
4	Tidak tahu	18	60
Jumlah		30	100

Bila dilihat dari tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab sanksi yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Natuna terhadap pelaku penyakit masyarakat yang menjawab kurungan 1 orang atau

⁴ Irwanto, (Selaku Masyarakat), *wawancara*, Semedang Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 17 April 2010

3.33 %, seperti kata saudara Jamaluddin beliau mengatakan “aku pernah melihat sekelompok pemuda yang minum-minuman keras di tepi jalan, lalu mereka di tangkap polisi dan dikurung dalam waktu beberapa bulan”. Mungkin itulah jalan yang terbaik yang harus dilakukan agar membuat mereka jera.⁵

Sementara responden yang menjawab yang menjawab denda 9 orang atau 30 %, walaupun mereka sudah di penjara terkadang belum juga membuat mereka jera. Sementara responden yang menjawab yang menjawab diasingkan 2 orang atau 6,67%, seperti kata bapak M. Thalib mereka yang berbuat onar seperti mabuk-mabukan dan judi selalu lebih baik diasingkan agar apa yang mereka perbuat tidak menular kepada yang lainnya.⁶

Sedangkan yang menjawab tidak tahu 18 orang atau 60%, seperti kata saudara Sepriyanto aku sendiri tidak tahu apa yang hukuman bagi pelaku peminum khamar dan judi, yang saya ketahui banyak orang yang berbuat demikian tetapi tidak mendapat sanksi apa-apa dari Pemerintah Daerah, apalagi katanya sudah ada Perda yang mengatur hukuman bagi para pelaku tersebut tapi kelihatannya hanya menjadi peraturan saja tetapi tidak dilaksanakan.⁷

TABEL 5

⁵ Jamaluddin, (Staf Kelurahan), *wawancara*, Sedanau Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 17 April 2010

⁶ M. Thalib, (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Gunung Putri Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 17 April 2010

⁷ Sepriyanto, (Pemuda Kampung), *wawancara*, Sedanau Timur Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 17 April 2010

**Tanggapan Responden Apakah Judi dan Miras Menjadi Kasus
Yang Paling Dominan di Kecamatan Bunguran Barat**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya	23	76.67
2	Tidak	2	6.67
3	Ragu-ragu	2	6.67
4	Tidak tahu	3	3.33
Jumlah		30	100

Bila dilihat dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap judi dan miras menjadi kasus yang paling dominan di Kecamatan Bunguran Barat yang menjawab ya 23 orang atau 76,67 %, ketika penulis mewawancarai Bapak Aspar beliau mengatakan “dari sekian banyak jenis penyakit masyarakat yang sangat berkembang dikampung ini adalah khamar dan judi, pada umumnya masyarakat disini nelayan mereka biasanya minum arak putih atau cece dan beras kencur dicampur dengan heineken untuk menghilangkan rasa dingin sewaktu pergi melaut. Hal ini harusnya tidak hanya menjadi penyakit masyarakat tetapi penyakit bagi pemerintah”.⁸

Sedangkan yang menjawab tidak 2 orang atau 6,67%, yang menjawab ragu-ragu 2 orang atau 6,67%, yang menjawab tidak tahu 3 orang atau 3,33%. Seperti halnya dengan apa yang dikatakan oleh Said Yasin tidak hanya khamar dan judi saja jenis penyakit masyarakat yang ada di kecamatan Bungaran barat ini

⁸ Aspar, (Kepala Desa Mekar Jaya), *wawancara*, Mekar Jaya Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 17 April 2010

tetapi masih banyak lagi seperti, terdapat tempat pelacuran, prostitusi, perbuatan asusila homo seksual.⁹

TABEL 6
Tanggapan Responden Terhadap Jumlah Penyakit Masyarakat
Khususnya Judi dan Miras yang Ada di Kecamatan Bunguran Barat Yang
Anda Ketahui Dalam Setahun

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	1 – 50 kasus	25	83.33
2	51 – 100 kasus	2	6.67
3	101 – 150 kasus	2	6.67
4	151 seterusnya	1	3.33
Jumlah		30	100

Bila dilihat dari tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap jumlah penyakit masyarakat khususnya judi dan miras yang ada di Kecamatan Bunguran Barat yang anda ketahui dalam setahun sangat bervariasi ada yang menjawab 1-50 kasus 25 orang atau 83,33 %, seperti yang diungkapkan oleh Firman berdasarkan data yang ada di kepolisian pada tahun 2009 untuk kasus judi dan miras sekitar antara 1-50 kasus.

Sedangkan yang menjawab 51-100 kasus 2 orang atau 6,67%, seperti ungkapan Abu Hurairah, menurut saya kasus miras dan judi berkisar 51-100 kasuslah, saya sih pernah dengar tapi tidak terlalu sering, ya, namanya saja keseharian kita dikantor, dan malam pun kita istirahat karena capek bekerja, jadi tidak terlalu sering mendengar berapa jumlah kasus judi dan miras di daerah kita

⁹ Said Yasin, (Staff Kecamatan), wawancara, Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 17 April 2010

ini.¹⁰ Sedangkan yang menjawab 151 dan seterusnya 1 orang atau 3,33%. Dan yang menjawab 101-150 kasus 2 orang atau 6,67%, seperti kata saudara Anto, saya sering dengar cerita miras dan judi di daerah ini, ya, bisa jadi juga kita bisa masuk sebagai pelaku miras dan judi di daerah ini, bahkan kebanyakan anak muda disini suka dengan miras, sebab itu sudah bagian dari pergaulan anak muda sekarang.⁴⁷

Sementara untuk mengetahui kinerja pelaksana penyakit masyarakat menghukum pelaku judi dan miras dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 7
Tanggapan Responden Terhadap Pelaksana Pekat Menghukum
Pelaku Judi dan Miras Yang Anda Ketahui di Kecamatan Bunguran Barat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sering	6	20
2	Tidak Pernah	18	60
3	Jarang	3	10
4	Tidak tahu	3	10
Jumlah		30	100

Bila dilihat dari tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pelaksana pekat menghukum pelaku judi dan miras yang anda ketahui di Kecamatan Bunguran Barat yang menjawab sering 6 orang atau 20%,

¹⁰ Abu Hurairah, (Selaku Warga Kampung), wawancara, Binjai Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 18 April 2010

seperti dikatakan oleh saudara Andri Jasa Kita, para pelaku miras dan judi selalu kami tangkap dan kami beri tindakan tegas berdasarkan hukum dan Undang-undang yang berlaku dalam rangka penghapusan segala penyakit masyarakat agar tidak berkembang lebih luas lagi, kami adalah para penegak Perda selalu menjalankan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepada kami.¹¹

Dan yang menjawab tidak pernah 18 orang atau 60%, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Kasyipal Gammi, tidak pernah ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap para pelaku miras dan judi, hal tersebut terbukti dari makin marak dan berkembangnya penyakit ini di tengah-tengah masyarakat karena pemerintah tidak pernah menghukum para pelakunya sehingga tidak ada efek jera bagi mereka.¹²

Sedangkan yang menjawab Jarang 3 orang atau 10%, yang menjawab tidak tahu 3 orang atau 10%. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nurapilisa, ya kadang-kadang ada juga razia Satpol PP turun menggerebek tempat-tempat yang biasanya banyak orang melakukan miras dan judi tapi kadang-kadang juga gak ada, ya jarang-jaranglah ada penangkapan itu, saya juga kurang tahu pasti.¹³

Tabel 8

Tanggapan Responden Tentang Aturan Perda Pekat Yang Berlaku Saat Ini Sudah Berjalan Sesuai Dengan Kaidahnya

¹¹ Andri Jasa Kita, (Selaku Satpol PP), *wawancara*, Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 18 April 2010

¹² Kasyipal Gammi, (selaku Guru), *wawancara*, Batubi Jaya Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 18 April 2010

¹³ Nurapilisa, (Selaku Warga Kampung), *wawancara*, Plan Tengah Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 18 April 2010

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik Sekali	6	20
2	Tidak Pernah	15	50
3	Jarang	5	16.67
4	Tidak tahu	4	13.33
Jumlah		30	100

Bila dilihat dari tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang aturan Perda pekat yang berlaku saat ini sudah berjalan sesuai dengan kaidahnya yang menjawab baik Sekali 6 orang atau 20%, seperti diungkapkan oleh Mulyati, Perda di Kabupaten Natuna ini sudah berjalan dengan baik, walaupun terdapat sedikit hambatan namun Pemda berusaha untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Terkadang yang menjadi kesulitan Pemda dalam merealisasikan Perda adalah karena masyarakat tidak banyak tahu tentang Perda, sehingga jika diberi tindakan tegas mereka selalu berkelit dan menyalahkan pemerintah. Maklumlah masyarakat disini pada umumnya berpendidikan rendah.¹⁴

Sementara yang menjawab tidak Pernah 15 orang atau 50%, yang menjawab jarang 5 orang atau 16,67%, seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Kasim Usman, Perda di Kabupaten Natuna ini hanya menjadi peraturan saja tetapi tidak dapat dirasakan sama sekali oleh masyarakat. Perda hanya menjadi sebuah simbol tetapi tidak menjadi sebuah aturan yang dijunjung tinggi.¹⁵

¹⁴ Mulyati, (Selaku Staff Kecamatan), *wawancara*, Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 19April 2010

¹⁵ Kasim Usman, (Selaku Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Binjai Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 19April 2010

Sedangkan yang menjawab tidak tahu 4 orang atau 13,33%, seperti apa yang diungkapkan oleh Jamal, kami ini hanya nelayan tak paham langsung masalah politik itu, yang kami tahu hanya kerja mengais rejeki menghidupi anak dan keluarga kami, yang penting kami tidak pernah berbuat demikian (miras dan judi).¹⁶

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap Perda No. 10 Tahun 2005 tentang pekat di tinjau ulang kembali apa tidak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 9
Tanggapan Responden Terhadap Perda No. 10 tahun 2005 Tentang
Pekat di Tinjau Ulang Kembali

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	21	70
2	Kurang Setuju	3	10
3	Tidak Setuju	3	10
4	Tidak tahu	3	10
Jumlah		30	100

Bila dilihat dari tabel 9 di atas dapat di ketahui bahwa tanggapan responden terhadap Perda No. 10 Tahun 2005 tentang pekat di tinjau ulang kembali yang menjawab Sangat Setuju 21 orang atau 70%, seperti kata H. Muid, saya tidak melihat ada pengaruh Perda pekat Kab. Natuna ini terhadap masyarakat, ada atau tidaknya Perda pekat ini sama saja, masyarakat tetap saja

¹⁶ Jamal, (Selaku Warga Kampung), *wawancara*, Sedarat Baru Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 19 April 2010

berbuat begitu (miras dan judi). Jadi menurut saya harusnya Perda pekat itu di tinjau kembali, kita harus melihat situasi dan kondisi masyarakat sekitar, kira-kira aspek apa saja yang perlu dibenahi.¹⁷

Sementara yang menjawab kurang Setuju 3 orang atau 10%, seperti kata Fajri, untuk apa ganti-ganti Perda, mau ditinjau kembali pun tidak ada gunanya kalau realisasinya tidak berjalan, yang penting realisasinya bukan isinya, percuma kalau mantap Perdanya sementara realisasinya nol.¹⁸

Sedangkan yang menjawab tidak setuju 3 orang atau 10%, yang menjawab tidak tahu 3 orang atau 10%, seperti yang diungkapkan oleh Hapis, Perda Pekat Kab. Natuna itu sudah mantap dah, Cuma kitanya saja yang tidak disiplin dan taat pada peraturan undang-undang.¹⁹

Tabel 10
Tanggapan Responden Terhadap Kinerja Kecamatan Bunguran Barat Beserta Aparat Kepolisian, Pemuda, Alim Ulama, Terhadap Penyakit Masyarakat Judi dan Miras

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	12	40
2	Tidak Pernah	4	13.33
3	Jarang	9	30
4	Tidak tahu	5	16.67
Jumlah		30	100

¹⁷ Muid, (Selaku Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Sedanau Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 19 April 2010

¹⁸ Fajri, (Selaku Warga Kam pung), *wawancara*, Sedanau Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 19 April 2010

¹⁹ Hapis, (Selaku Pemuda Kampung), *wawancara*, Mekar Jaya Kec. Bunguran Barat, pada tanggal 20 April 2010

Bila dilihat dari tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa responden terhadap kinerja Kecamatan Bunguran Barat beserta aparat kepolisian, pemuda, alim ulama, terhadap penyakit masyarakat judi dan miras yang menjawab sangat Baik 12 orang atau 40%, yang menjawab tidak Pernah 4 orang atau 13,33%, yang menjawab jarang 9 orang atau 30%, yang menjawab tidak tahu 5 orang atau 16,67%.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 2 Tentang Penyakit Masyarakat judi dan Minuman Keras di Kecamatan Bungaran Barat

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab penghambat pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Natuna nomor 10 tahun 2005 tentang penyakit masyarakat khusus pada pasal 2 ayat 2 larangan judi dan minuman keras, di antaranya adalah :

Pertama, perundang-undang tidak tegas dan jelas menegaskan agar anggota DPRD untuk melakukan kontak dan komunikasi serta melakukan fungsi perwakilan dengan baik, hal ini karena para anggota DPRD Kabupaten Natuna tidak begitu aktif terhadap kemajuan daerahnya.

Kedua, Kurangnya tekanan publik dari pers, aktivis kampus, ormas, LSM yang ada di selingkungan Kabupaten Natuna kepada para anggota DPRD Kabupaten Natuna terhadap kinerja yang dimana apabila ada

pengawasan yang lebih maka mereka akan menjadi lebih aspiratif dan responsif pada kedudukannya sebagai peran anggota DPRD.

Berbagai kritik yang muncul lebih bersifat individual dan tidak berkesinambungan. Misalnya dalam hal aktivis kampus, universitas tidak begitu mengintegrasikan masalah pemantauan dan evaluasi kinerja baik Anggota DPRD maupun perangkat-perangkat lainnya. Kemudian khusus pers, ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Natuna mereka tidak begitu juga mengawasi tugas dan kinerja dari perangkat-perangkat yang berperan dalam masalah ini. Hal ini disebabkan karena setiap ormas maupun LSM yang ada di selingkungan Kabupaten Natuna masih bergantung kepada pemerintah daerah dalam hal dana operasional dan pembinaan organisasi.

Ketiga, Kurangnya dana dalam hal ini mengenai sosialisasi perda tersebut. Apalagi jarak antara pulau yang satu dengan yang lain harus melintasi waktu yang lama.

Berdasarkan faktor-faktor diatas jelas sekali pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2005 tentang penyakit masyarakat larangan judi dan minuman keras tidak berjalan dengan baik. Bahkan berdasarkan dari hasil pengamatan langsung dilapangan bahwa banyak masyarakat tidak mengetahui isi dari peraturan daerah tersebut. Ini membuat pelaksanaannya terhambat, mereka yang duduk di DPRD hanya membuat peraturan tapi kenyataan dilapangan kosong.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat 2 Tentang Penyakit Masyarakat Judi dan Minuman Keras

Pada pembahasan terdahulu telah diuraikan panjang lebar tentang judi dan minuman keras. Begitu juga telah dijelaskan faktor-faktor penghambat pelaksanaan perda tersebut. Selanjutnya akan di lihat pandangan hukum Islam terhadap kenyataan tersebut.

Dalam ajaran Islam, semua perbuatan yang dilakukan mukallaf akan mendapatkan nilai sesuai dengan yang dilakukannya. Namun, di dalam menetapkan hukuman, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang mukallaf ada aturan tersendiri dalam islam.

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2005 khusus pasal 2 ayat 2 tentang penyakit masyarakat judi dan minuman keras sangatlah bertentangan sekali, dimana disini para pelaksana perda khususnya Anggota Satpol PP tidak begitu menjalankan perannya dengan baik. Kemudian bagaimana pelaksanaannya sangat bertentangan dengan syariat Islam.

Apabila diperhatikan faktor penyebab terjadinya judi dan minuman keras di antaranya adalah adanya tradisi yang dilakukan secara turun temurun . Hal ini memberikan indikasi bahwa kebiasaan yang dilakukan sangat bertentangan dengan hukum Islam. Dalam tinjauan fiqih siyasah sebagaimana yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW, yaitu membentuk institusi eksekutif dan administrasi melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena hal

ini terkait dengan pribadi muhammad SAW sebagai Rasulullah dan sekaligus sebagai seorang Kepala Negara.²⁰

Di antar tradisi orang-orang jauhilah duhulu adalah berjudi. Adapun bentuk judi yang paling terkenal itu adalah sepuluh orang berserikat membeli seekor onta dengan saham yang sama. Kemudian dilakukan undian. Dari situ, tujuh orang dari mereka mendapatkan bagian yang berbeda-beda menurut tradisi mereka, dan tiga orang lainnya tidak mendapatkan apa-apa^[21].

Adapun di zaman kita saat ini maka bentuk perjudian sudah beraneka ragam, di antaranya: A.apa yang dikenal yanasib (undian) dalam berbagai bentuknya. Yang paling sederhana di antaranya adalah dengan membeli nomor-nomor yang telah disediakan, kemudian nomor-nomor itu diundi. Pemenang pertama mendapatkan hadiah yang amat menggiurkan. Lalu pemenang kedua, ketiga dan demikian seterusnya dengan jumlah hadiah yang berbeda-beda. Ini semua adalah haram, meski mereka berdalih untuk kepentingan sosial.

Membeli suatu barang yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dirahasiakan atau memberinya kupon ketika membeli barang, lalu kupon-kupon itu diundi untuk menentukan pemenangnya.

Termasuk bentuk perjudian di zaman kita saat ini adalah asuransi jiwa, kendaraan, barang-barang, kebakaran, atau asuransi secara umum,

²⁰ Djauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), cet. ke-1, h. 172

²¹ dan mereka wajib membayar harga unta

asuransi kerusakan dan bentuk-bentuk asuransi lainnya. bahkan sebagian artis penyanyi mengasuransikan suara mereka, ini semuanya haram ⁽²²⁾.

Demikianlah, dan semua bentuk taruhan masuk dalam kategori judi. Pada saat ini bahkan ada club khusus judi (kasino) yang di dalamnya ada alat judi khusus yang disebut rolet khusus untuk permainan dosa besar tersebut.

Juga termasuk judi, taruhan yang di adakan saat berlangsungnya sepak bola, tinju atau yang semacamnya. Demikian pula dengan bentuk-bentuk permainan yang ada di beberapa toko mainan dan pusat hiburan, sebagian besar mengundang unsur judi, seperti yang mereka namakan dengan lippers.

Tinjauan hukum pidana Islam yang dimuat pada Perda No. 10 Tahun 2005 tentang Pekat Kab. Natuna tersebut di atas dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu;

1. Hudud²³ (Hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya)

Mengingat hudud ini telah jelas hukumannya, baik bentuk maupun ukurannya maka hakim tidak punya kebebasan lagi untuk menemukan hukum lain, dalam kesempatan ini hakim hanya memiliki kesempatan berijtihad untuk menetapkan “apakah tindak pidana itu benar

²² Tentang hukum asuransi dan solusinya menurut Islam, lihat majalah, *al-Buhuts Islamiyah*; edisi, 17,19.20. terbitan Ar Ri'asatul Ammah Li Dirasotil Ilmiyah.

²³ Hukum Pidana (Hudud) adalah Hukuman yang sudah ditentukan Allah SWT. baik bentuk maupun jumlahnya, dan ini harus dilaksanakan karena berupa hak Allah SWT., Abdul Aziz Amir, *Al-Ta`zir fi al-Syari`at al-Islamiyah*, (Kairo : Dar al-Fikri al-`Arabi, 1976 M.), hlm. 13

telah dilakukan, atau pun tidak,” bila ini telah jelas dilakukan maka hakim tinggal mengambil hukuman yang telah tersedia untuk itu.

Sejalan dengan ketentuan hudud seperti dikemukakan di atas, yaitu tentang “mengkonsumsi khamar” (minuman keras) dan sejenisnya, dengan sanksi hukuman cambuk sebanyak 40 kali.²⁴

Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik RA., Bahwa seseorang yang telah meminum khamar dibawa ke depan Rasul SAW., maka Rasul SAW. Mencambuknya dengan dua buah cambuk sebanyak empat puluh kali. Hal seperti ini diikuti oleh Abu Bakar ...²⁵

Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Muslim, dari Ali tentang kisah Al-Walid ibn `Uqbah, bahwa Usman ibn `Affan telah menyuruh Ali untuk menerapkan hukum cambuk terhadap Walid ibn `Uqbah karena dia meminum khamar, untuk hal ini Ali meminta Abdullah ibn Ja`far untuk melakukan penyambukan, lalu dia melakukannya, maka pada saat sudah genap empat puluh kali cambukan dia pun berkata, sudah cukup, dan menambah ucapannya lagi; Rasul melakukan cambukan pada orang

²⁴ Qanun No.12 Tahun 2003., Pasal 5, berbunyi; Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya., Pasal 26, berbunyi; Swetiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan `uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk., Dalam penjelasan pasal-pasal dinyatakan tentang yang dimaksud dengan khamar dan sejenisnya adalah minuman yang mempunyai sifat atau kebiasaan memabukkan atas dasar kesamaan illat (sebab), yaitu memabukkan, seperti ; bir brendi, wiski, tuak, dan sebagainya., Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, Himpunan Undang Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2005), hlm.255, dan260.

²⁵ Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz.IV, (Bandung : Dahlan, t.t.), 28

meminum khamar sebanyak empat puluh kali, dan Abu Bakar juga melaksanakan demikian, ...²⁶

Direncanakan bahwa kasus kedua menyangkut hudud ini adalah tindak pidana pencurian dengan sanksi hukuman potong tangan.²⁷

2. Ta`zir²⁸ (Hukuman yang diberi kebebasan bagi hakim untuk menentukannya)

Mengingat adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman dalam kasus ta`zir ini maka kesempatan hakim berijtihad untuk menentukan apa hukuman yang akan ditetapkan bagi pelakunya, dan bagaimana cara pelaksanaannya sangat besar. Dengan demikian, kejelian hakim untuk menentukan hukum yang akurat dalam hal ini sangat diperlukan.

²⁶ Ibid., hlm. 30

²⁷ Jika qanun tentang pencurian ini telah lahir maka ada dua hal yang ingin disampaikan tentang hal ini, yaitu; Pertama, hukum pidana Islam yang diterapkan itu tidak lagi hanya masalah-masalah kecil, dan berdampak bagi masyarakat kecil semata, tetapi tindak pidana ini sudah mulai tingkat menengah (sedang), termasuk pelakunya akan meliputi kelas menengah ke atas, seperti pejabat yang melakukan korupsi., Kedua, meskipun hukum potong tangan telah diterapkan, tidaklah secara serta merta akan ada orang yang dipotong tangannya, bisa saja menjadi sok terapi untuk tidak ada orang yang dipotong tangan, karena tidak ada yang terbukti melakukan pencurian, Dinasti Saudi saja menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri pada tahun 1910, baru setelah 60 tahun ada tangan orang yang dipotong karena mencuri, yaitu setelah tahun 1970-an. Analisis seperti ini dikemukakan oleh Al Yasa` Abubakar (Kepala Dinas Syariat NAD) di kantornya pada tanggal 06-02-2006.

²⁸ Ta`zir adalah Hukuman pendidikan yang diberikan bagi orang yang melakukan tindak pidana, namun Tuhan (syari`at) tidak menentukan bentuk dan jumlah hukumannya., Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri` al-Jinai al-Islami*, Juz. 1, (Kairo : Maktabah Daru al-Turas, t.t.), hlm.685.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bahwa hukum ta`zir tersebut telah dijabarkan ke dalam lima bentuk, sebagai berikut;

- 1). Hukum Cambuk;
- 2). Hukum Denda;
- 3). Hukum Penjara;
- 4). Hukuman Administratif;
- 5). Hukuman Kumulasi dari hal tersebut di atas;
- 6). Hukuman Berpilih dari hal tersebut di atas;

Berpegang teguh kepada ajaran yang tertuang dalam kitab suci al-Qur'an merupakan ciri seorang muslim. Artinya, dalam sebuah perilakunya ia harus tuliskan dengan syariat atau aturan yang datang dari Allah SWT, seperti digambarkan dalam Al-Qur'an surat al-A'raf ayat 170 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ
أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾

Artinya : *“Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab (Taurat) serta mendirikan shalat (akan diberi pahala) karena sesungguhnya kami tidak menyalakan pahala orang.*

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, Prajudi. 1985. *Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bratawidjaja, Thomas Wijasa. 1995. *Petunjuk Baru Korespondensi Niaga Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pradya Pramita.
- Hajar, Ibnu. 1999. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo Persada
- Sarwoto. 1985. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Soedjito dan Solchan TW. 1999. *Surat Menyurat Resmi Bahasa Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Suhil Achmad, Said. 2004. *Pedoman Surat Menyurat Modern*. Pekanbaru, FKIP UNRI.
- Sudijoro, Anas. 2004. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 1994. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sultisna, Oteng. 1985. *Administrasi Pendidikan (Dasar Teoretis Untuk Praktek Profesional)*. Bandung: Angkasa.
- Sutrisno, dan Anwar Sanusi. 2003. *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Rahardi, Kunjana. 2008 *Aturan Pembuatan dan Pemakaian Bahasa Surat Dinas*. Yogyakarta: CV Pinus Book Publisher.
- Haryadi, Hendi. 2009 *Administrasi Perkantoran*. Jakarta: Visi Media
- Yose Rizal Sidi Marajo dkk. *multipurpose letters (aneka konsep surat untuk berbagai keperluan)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Reksohadiprawiro, Munawardi. *Administrasi Perkantora*. Pekanbaru: Modul
- Yamin, Martinus dan Maisah, *Standarisasi Kinerja Guru*. Jambi CP PRESS.

DAFTAR TABEL

- TABEL 1 Luas kecamatan Bunguran Barat Diperinci Menurut Desa/Kelurahan Dan Jarak Ke Ibu kota Kecamatan Tahun 2009
- TABEL 2 Jumlah Penduduk Menurut Agama Masyarakat Kecamatan Bunguran Barat Tahun 2009
- TABEL 3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Bunguran Barat Tahun 2009
- TABEL 4 Data Dinas/Instansi Kecamatan Bunguran Barat Tahun 2009
- TABEL 5 Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Daerah turut berperan serta dalam menanggulangi segala perbuatan penyakit masyarakat yaitu Khamar dan Judi
- TABEL 6 Tanggapan responden tentang Perda Pekat nomor 10 tahun 2005 di kabupaten natuna telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kaidahnya
- TABEL 7 Tanggapan responden terhadap pelanggaran apa saja yang terjadi yang berhubungan dengan Perda Pekat nomor 10 tahun 2005
- TABEL 8 Tanggapan responden terhadap sanksi yang diberikan pemerintah Daerah Kabupaten Natuna terhadap pelaku penyakit masyarakat.
- TABEL 9 Tanggapan responden apakah Judi dan Miras menjadi kasus yang paling dominan di Kecamatan Bunguran barat
- TABEL 10 Tanggapan responden terhadap jumlah penyakit masyarakat khususnya Judi dan Miras menjadi kasus yang ada di Kecamatan Bunguran Bsrst yang anda ketahui dalam setahun
- TABEL 11 Tanggapan Responden terhadap pelaksana Pekat menghukum pelaku Judi dan Miras yang anda ketahui di Kecamatan Bunguran Barat.
- TABEL 12 Tanggapan responden tentang aturan Perda Pekat yang berlaku saat ini sudah berjalan sesuai dengan kaidahnya
- TABEL 13 Tanggapan responden terhadap Perda nomor 10 tahun 2005 tentang Pekat ditinjau ulang kembali
- TABEL 14 Tanggapan responden terhadap kinerja Kecamatan Bunguran Barat sudah berjalan beserta aparat kepolisian, pemuda, alim ulama, terhadap penyakit Masyarakat Judi dan Miras.

Kuesioner Penelitian

1. Setujukah anda jika Pemerintah Daerah turut berperan serta dalam menanggulangi segala perbuatan penyakit masyarakat yaitu khamar dan judi?
 - a. Sangat setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Tidak tahu
2. Apakah pendapat saudara tentang perda pekat Nomor 10 Tahun 2005 di Kabupaten Natuna telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kaidahnya?
 - a. Sangat setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Tidak tahu
3. Pelanggaran apa saja yang terjadi yang berhubungan dengan perda pekat nomor 10 tahun 2005 di tempat kediaman anda?
 - a. Judi dan Miras
 - b. Prostitusi
 - c. Homo sex dan Lesbian
 - d. Dan lain-lain
4. Apakah menurut saudara sanksi yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Natuna terhadap peaku penyakit masyarakat?
 - a. Kurang
 - b. Denda
 - c. Diasingkan
 - d. Tidak tahu
5. Apakah judi dan minuman keras menjadi kasus yang paling dominan di kecamatan bunguran barat?
 - a. Sangat setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Tidak tahu
6. Berapa jumlah penyakit masyarakat khususnya judi dan miras yang ada di kecamatan bunguran barat yang anda ketahui dalam setahun?
 - a. 1-50 kasus
 - b. 51-100 kasus
 - c. 101-150 kasus
 - d. 151-dan seterusnya

7. Pernahkan pelaksanaan pekat menghukum pelaku judi dan miras yang anda ketahui di kecamatan bunguran barat?
 - a. Sangat setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Tidak tahu
8. Apakah menurut saudara aturan perda pekat yang berlaku saat ini sudah berjalan sesuai dengan kaidahnya?
 - a. Sangat setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Tidak tahu
9. Setujukah anda perda nomor 10 tahun 2005 tentang pekat di tinjau ulang kembali?
 - a. Sangat setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Tidak tahu
10. Apakah menurut saudara kinerja kecamatan bunguran barat sudah berjalan beserta aparat kepolisian, pemuda, alim ulama, terhadap penyakit masyarakat?
 - a. Sangat setuju
 - b. Kurang setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Tidak tahu